

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan awal RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat

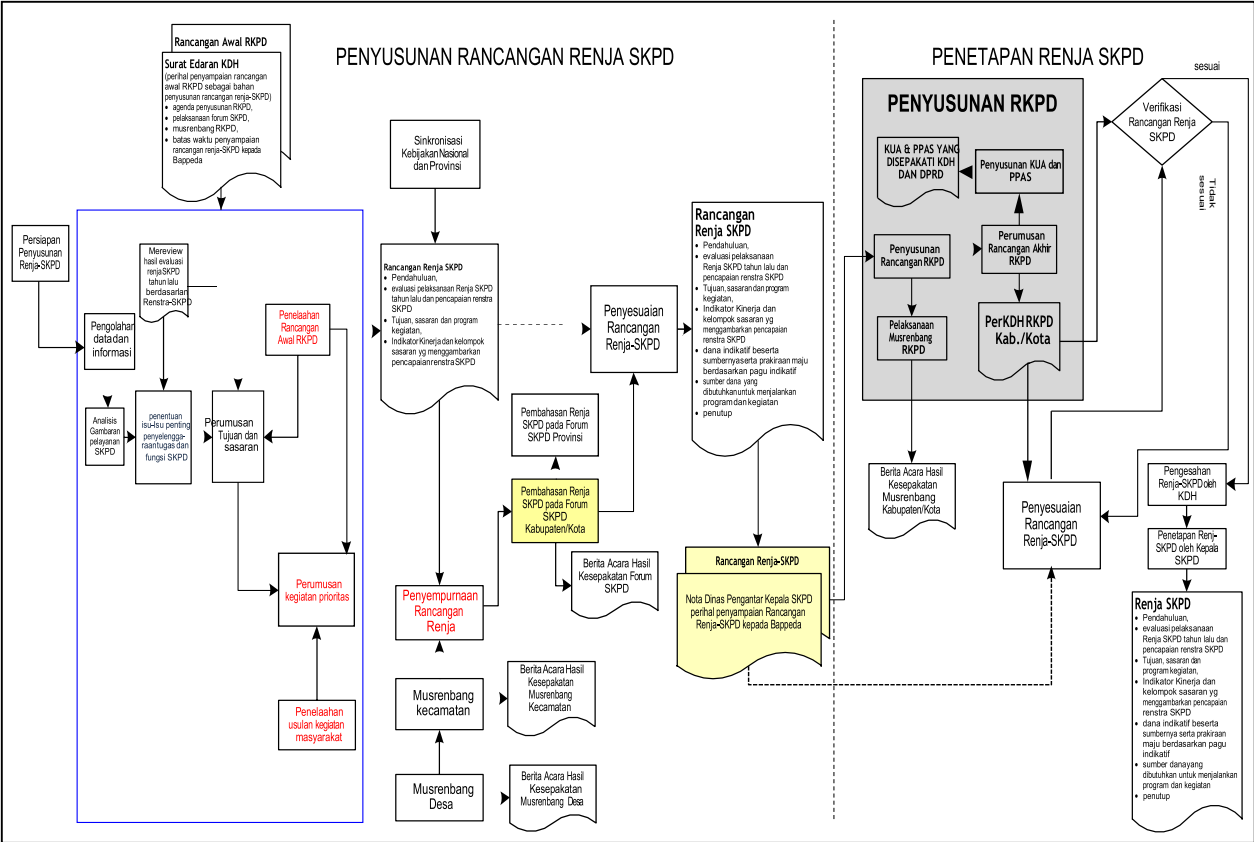
Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Terngah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Renja SKPD/Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 disusun dengan berpedoman RKPD Tahun 2026 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan lagi dengan setiap OPD menyusun dokumen perencanaan Renstra 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sehingga RKPD Tahun 2026 menjadi langkah awal sekaligus bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan serta dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA- Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA, sebagai penjabaran dari APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai wujud dari proses penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaiannya Landasan Hukum.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan tahun pertama sebagai dari penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, dengan prioritas :

- a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
- b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
- c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah masuk pada prioritas daerah ke-satu yaitu “Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis” dengan fokus pada pengelolaan manajemen talenta dan pengembangan kompetensi dengan didukung oleh transformasi digitalisasi pemerintahan yang cepat dan terintegrasi.

1.2. Landasan hukum

- 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 10 Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 - 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 - 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 - 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-06/2025);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk memutakhirkan dan memverifikasi data perencanaan dan keuangan daerah;

- 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
- 23 Peraturan Gubernur Nomor Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 24 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor S/000.7.2.5/509/2025 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Mendasarkan tujuan dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah tersebut diatas, BKD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung melalui implementasi, prioritas ke-empat yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif” melalui program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan

dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKD
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BKD
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jawa Tengah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
	4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
BAB V	PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk prakiraan capaian tahun 2026. Adapun program/kegiatan pada tahun 2025 yang tercapai target dan yang tidak tercapai target indikatornya yaitu antara lain:

1. Indikator program :

- a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan;
- b. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN;
- c. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi;
- d. Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu;
- e.
- f. Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN;
- g. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN;
- h. Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN.

2. Indikator Kegiatan :

- a. Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan;
- b. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN;
- c. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi;
- d. Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN;
- e. Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN;
- f. Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 antara lain :

1. Adanya Peraturan terbaru terkait simplifikasi nomenklatur Jabatan Pelaksana, yaitu Permen PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan instansi pemerintah dan Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan pemerintah, mengharuskan Bidang Mutasi untuk merubah sistem mutasi jabatan pelaksana, dikarenakan adanya penyederhanaan nomenklatur pada Jabatan Pelaksana PNS;
2. Penyelesaian Tenaga Non ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih belum maksimal karena tidak sesuai formasi PPPK yang dibuka dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan Sistem Informasi dan layanan kepegawaian pada SKPD dan UPT/Satker/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Perlunya penguatan implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan persiapan perencanaan zona integritas di BKD Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
				BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN										
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya Melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	91%	91%	91%	40	92%	92%	40
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi ASN	dok	36	12	12	12	100	12	12	25
5	3	2	1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	dok	3	5	1	1	0	1	1	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	dok	36	12	12	12	25	12	12	25
5	3	2	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	dok	21	7	7	7	15	7	7	15
5	3	2	1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	lap	3	1	1	1	100	1	1	100
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	lap	12	4	4	4	25	4	4	25
					Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	dok	6000	8599	2000	3314	165,71	1000	1000	100,1
						dok	0	1	1	1	0	0	0	0
					Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	dok	198	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	dok	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	lap	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	dok	1	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	lap	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	lap	6	2	2	2	0	2	2	0
					Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	%	900	263	300	300	0	300	300	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	3	2	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	paket	6	2	2	2	0	0	0	0
5	3	2	1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	orang	90	30	30	30	0	30	30	0
5	3	2	1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PAK yang ditetapkan	orang	60	20	20	20	50	20	20	50
					Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	%	100	100	100	100	50			50
					Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	paket	36	12	12	12	25	12	12	25
5	3	2	1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai PKSP	paket	6	2	2	2	50	2	2	50
5	3	2	1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya	paket	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					di lingkungan Pemprov Jateng									
					Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	paket	3	1	1	1	100	1	1	100
					Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	paket	6	2	2	2	50	2	2	50
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian	Dok	36	12	12	12	0	0	0	0
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	Lap	36	12	12	12	25	12	12	25
5	3	2	1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Lap	36	12	12	12	25	12	12	25
					Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Dok	0	1	1	1	0	0	0	0
					Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Dok	36	12	12	12	25	12	12	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Unit	15	5	5	5	0	0	0	0
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pensiun tepat waktu	Unit	3	n/a	1	1	0	0	0	0
5	3	2	1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Unit	12	n/a	4	4	0	0	0	0
					Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Paket	9	n/a	3	3	0	0	0	0
5	3	2	1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	3	2	1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah fasilitasi Izin Cuti	Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0
					Jumlah pembuatan Karis/Karsu	Unit	3	n/a	1	1	0	1	1	0
						Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah pembuatan Karpeg	Unit	18	n/a	6	6	66	6	6	66
					Jumlah penerbitan SPTKG	Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0
					Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25
					Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25
5	3	2	1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25
5	3	2	1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	Lap	36	12	12	12	25	12	12	25
					Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Lap	36	12	12	12	25	12	12	25
					Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Unit	81	27	27	27	0	0	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Test Mutasi PNS	Unit	81	27	27	27	0	0	0	0
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penanganan kasus kepegawaian	Unit	81	27	27	27	100	27	27	100
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	Unit	9	3	3	3	0	3	3	0
5	3	2	1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	2	1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0
5	3	2	1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Unit	6	n/a	2	2	50	2	2	50
					Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Unit	36	n/a	12	12	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0
5	3	2	1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Penanganan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	%	100	n/a	50	50	30	100	100	30
					Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	Lap	36	12	12	12	0	0	0	0
5	3	2	1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN		100	n/a	100	100	100	100	100	100
5	3	2	1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	%	100	100	100	100	30	100	100	30
					Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	%	100%	100	100	100	30	100	100	30

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Dok	54	18	18	18	62	18	18	62
5	3	2	1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Lap	66	23	23	23	17,4	23	23	17,4
					Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah		100%	100	100	100	100	100	100	100
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi		100%	100%	100%	100	100	100	100	100
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	90	100	30	30	10	60	60	10
5	3	2	1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital		150.000	1.586.250	50.000	50.000	37.500	150.000	150.000	37.500
					Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard		50.700	9.000	16.900	16.900	25	16.900	16.900	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					(menggunakan lactomapfolder)									
					Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)		198	n/a	66	201	304,55	66	66	304,55
5	3	2	1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	n/a	100	100	100	100	100	100
5	3	2	1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg		3	1	1	1	0	1	1	0
					Jumlah dokumentasi profil kepegawaian		5.4	1.8	1.8	1.8	6	1.8	1.8	6
					Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian		100	80	80	80	100	100	100	100
					Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg		120	40	40	40	100	38	38	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan		100	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK		100	100	100	100	100	100	100	100
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
5	3	2	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah		100%	100	100	100	100	100	100	100
5	3	2	1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya		100%	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng		3	1	1	1	0	1	1	0
					Penyempurnaan metode penilaian kompetensi		1.2	400	400	400	0	400	400	0
5	3	2	1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi		3	1	1	1	1	1	1	1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	3	2	1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya		100	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.		100	100	100	100	100	100	100	100
					Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.		3	1	1	1	75	1	1	75
X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	n/a	100	100	30	100	100	30
X	XX	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100%	100%	100	100	30	100	100	30
X	XX	1	1.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dok	54	54	18	18	62	18	18	62

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Lap	66	66	23	23	17,4	23	23	17,4
X	XX	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	91%	91%	40	92%	92%	40
X	XX	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	36	12	12	12	100	12	12	25
X	XX	1	1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN		100	100	100	100	100	100	100	100
X	XX	1	1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN		900	300	300	300	0	300	300	0
X	XX	1	1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan PD (jenis)		1.2	400	400	400	0	400	400	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dok	0	0	1	1	0	0	0	0
X	XX	1	1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	dok	1	n/a	1	1	100	1	1	100
X	XX	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	n/a	100	100	50	100	100	100
X	XX	1	1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	paket	6	n/a	2	2	0	0	0	0
X	XX	1	1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	90	150	30	30	0	30	30	0
X	XX	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	n/a	100	100	50	100	100	100
X	XX	1	1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	paket	36	n/a	12	12	25	12	12	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor yang disediakan									
X	XX	1	1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	6	n/a	2	2	50	2	2	50
X	XX	1	1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	n/a	1	1	100	1	1	100
X	XX	1	1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	3	n/a	1	1	100	1	1	100
X	XX	1	1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	6	n/a	2	2	50	2	2	50
X	XX	1	1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	36	n/a	12	12	0	0	0	0
X	XX	1	1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	36	60	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Lap	36	60	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dok	36	n/a	12	12	25	12	12	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	25	5	5	0	0	0	0
X	XX	1	1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	12	n/a	4	4	0	0	0	0
X	XX	1	1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	9	n/a	3	3	0	0	0	0
X	XX	1	1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	0	n/a	0	0	0	0	0	0
X	XX	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap	36	60	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	36	60	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realiasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024-2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan realisasi Target Akhir Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	XX	1	1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Lap	36	n/a	12	12	25	12	12	25
X	XX	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	81	135	27	27	0	0	0	0
X	XX	1	1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	81	n/a	27	27	100	27	27	100
X	XX	1	1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	9	n/a	3	3	0	3	3	0
X	XX	1	1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	6	10	2	2	50	2	2	50
X	XX	1	1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Unit	36	60	12	12	100	12	12	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan di Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

- a. Pengembangan Kompetensi ASN;
- b. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan dan Penilaian Kinerja;
- d. Mutasi dan Promosi;
- e. Penilaian Kompetensi ASN.

Dalam Bidang Perencanaan dan pengembangan pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap seleksi dan pengiriman peserta diklat, penyusunan data formasi, pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar, pengelolaan dan pengembangan pegawai, ujian kedinasan, penilaian e-Kinerja bagi seluruh ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seleksi dan pelantikan jabatan struktural, penyiapan bahan seleksi administrasi mutasi jabatan struktural, penyusunan konsep pola karir, mutasi kepegawaian jabatan fungsional tertentu, penyiapan bahan administrasi pengangkatan jabatan fungsional tertentu jenjang utama.

Dalam Bidang Mutasi, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pelaporan SKP ASN, usulan kenaikan pangkat, pemberian cuti, pengambilan sumpah janji ASN, pengusulan kartu pegawai elektronik, penerbitan kartu istri dan kartu suami, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pengadaan CPNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penyiapan bahan pengangkatan CPNSD dan PNS, pengkoordinasian dan penempatan siswa IPDN, penyiapan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian PNS, penetapan keputusan bebas tugas PNS yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun.

Dalam Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan kesejahteraan pegawai, fasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental bagi pegawai, pengelolaan administrasi uji kesehatan PNS, pengelolaan jaminan kesehatan kerja, pengelolaan pemberian penghargaan, pelayanan administrasi BAPETARUM PNS, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps ASN, pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik

instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam Bidang Informasi Kepegawaian, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi penggajian dan tunjangan kinerja PNS, pengelolaan presensi *online* PNSD, pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian daerah, rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN. Dalam bidang uji kompetensi ditunjukkan dengan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	Persentase ASN Pemprov Jateng yang dilantik dalam Jabatan			100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN			100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu			100%	100%	80%	100%	
4	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi			100%	100%	100%	100%	
5	Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN			100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan			100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN			100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			91%	92%	91%	92%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tergambar dalam Tabel. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tugas Perencanaan dan pengembangan pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan Informasi Kepegawaian, sehingga akan dapat terwujud melalui sinergi program dan kebijakan dalam bidang kepegawaian baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Disamping itu, koordinasi dan kerjasama dengan SKPD internal di pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa dibangun dan ditingkatkan dalam hal pelayanan kepegawaian. BKD Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Untuk sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT dan juga sasaran dalam Rancangan Awal Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang dalam hal ini pada tahap penyusunan telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra BKN Tahun 2025-2029 dalam “Mewujudkan meritokrasi dan profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan Visi Presiden yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam lingkup kepegawaian menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan kepegawaian masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain terkait validasi dan update data pegawai serta belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan BKN. Selain itu dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pendampingan dalam pembuatan dokumen Renstra Kabupaten/Kota yang belum mengakomodasi indikator sistem merit, sehingga menjadi prioritas BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk penerapan sistem merit.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir selama berjalannya Renstra 2024-2026, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi secara garis besar permasalahan yang dihadapi BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Kebutuhan pemenuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, khususnya untuk formasi jabatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun.
- b. Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Sedangkan tantangan yang akan dihadapi pada tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 adalah diantaranya penyelesaian tenaga Non ASN menjadi P3K paruh waktu dengan segala jenis jabatannta, status kenaikan gaji ASN yang belum pasti karena kendala fiskal pusat maupun daerah, serta ketidakpastian pengadaan CASN pada kuota dan prioritas formasi CASN berdasarkan kebutuhan.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Terhadap Pencapaian Nasional/Internasional

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Konsultasi Publik rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”

Upaya mewujudkan visi dimaksud akan dilakukan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya local, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan social serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas” dengan memfokuskan pengelolaan manajemen talenta dan pengembangan kompetensi dengan didukung pengembangan layanan kepegawaian berbasis digital.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen ASN dan pengelola kepegawaian daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9).

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan kepegawaian ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan,

- dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan dan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, membentuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan Pelayanan Kepegawaian :

- a. Tingginya gelombang pensiun ASN ditambah dengan ketidakpastian kebijakan perencanaan pengadaan ASN, yang berakibat pada keterbatasan jumlah ASN sehingga redistribusi pemerataan jumlah ASN di setiap OPD maupun UPT menjadi opsi yang sangat logis disamping pemenuhan dari hasil mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi (doctoral ke atas), sehingga pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan harus disempurnakan kembali baik skema maupun teknisnya;

- c. Pengelolaan Jabatan fungsional ke depan akan menjadi sangat strategis, sehingga perlu disiapkan dan dimatangkan kembali terkait pengembangan dan pengelolaannya;
- d. Penilaian kinerja ASN belum menggambarkan kinerja riil individu ASN, sehingga penilaian kinerja harus diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi;
- e. Belum tersedianya standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan ASN, sehingga proses analisis kesenjangan kompetensi belum berjalan maksimal;
- f. Belum tersedianya profil kompetensi ASN secara menyeluruh berdasarkan hasil Penilaian potensi, kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya;
- g. Penyesuaian Kembali Manajemen talenta yang ada saat ini seiring dinamika kebijakan di tingkat pusat yang kemudian berdampak ke daerah;
- h. Belum seimbang system reward and punishment ASN;
- i. Perlunya peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi fungsi, fitur, jaringan dan sekuritasnya.

Peluang Pelayanan Kepegawaian :

- a. Tingginya minat ASN dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga penerimaan ASN melalui jalur mutasi masuk dapat menjadi opsi pemenuhan SDM yang realistis;
- b. Pemberian peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar, difokuskan pada beberapa jenis rumpun keilmuan sebagaimana kebutuhan dan prioritas daerah baik jenjang Magister maupun Doktoral, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga motivasi ASN untuk mengikuti program tugas belajar tinggi dan mendukung tercapainya kinerja daerah;
- c. Tingginya minat ASN untuk beralih ke jabatan Fungsional harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pengelolaan jabatan fungsional, sehingga keberadaan jabatan fungsional akan menjadi pilihan karir yang strategis;
- d. Pengembangan instrument penilaian kinerja diikuti dengan integrasi sistem informasi dan terintegrasi dengan kinerja organisasi;
- e. Keberadaan standar kompetensi jabatan sangat strategis, sehingga harus diakselerasi koordinasi dengan Instansi yang membidang terkait penyusunan standar kompetensi jabatan ASN;
- f. Dengan sistem informasi yang sudah terbangun, harus segera mengintegrasikan data ASN untuk penyusunan profil ASN berbasis potensi

- dan kompetensi dan kinerja berikut analisis kesenjangannya agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Penguatan Manajemen talenta dengan memanfaatkan data base yang sudah dibangun ada saat ini dengan berdasarkan pada pola karir instansi dan pola karir nasional;
 - h. Pengelolaan reward ASN baik bersifat finansial maupun non Finansial secara seimbang;
 - i. Peningkatan kualitas System informasi kepegawaian baik dari sisi kualitas, fitur, fungsi, jaringan dan sekuritas serta memanfaatkan *Artificial intelligent (AI)* dalam beberapa layanan kepegawaian.

2.3.5 Isu Strategis yang Perlu ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Jawa Tengah dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 antara lain :

- a. Penataan dan penyelesaian tenaga Non ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan Scholarship Preparation LPDP Luar Negeri;
- c. Penyempurnaan Manajemen Talenta dan integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi;
- d. Perbaikan tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. Perbaiki proses mutasi masuk dengan memperhatikan skala prioritas, sampai dengan unit terendah;
- f. Pelaksanaan CAT Potensi online dan pengembangan metode penialain cepat kompetensi ASN (Quick Test Kompetensi);
- g. Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital;
- h. Peningkatan kode etik, kode perilaku dan netralitas ASN pasca tahun politik;
- i. Penekanan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, khususnya angka perceraian ASN;
- j. Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	85%	2.626.000.000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	85%	2.626.000.000	
			Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	92%	1.090.000.000			Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	92%	1.090.000.000	
			Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	10%	845.000.000			Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	10%	845.000.000	
			Persentase peningkatan kinerja ASN	85%	275.000.000			Persentase peningkatan kinerja ASN	85%	275.000.000	
			Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	100%	1.600.000.000			Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	100%	1.600.000.000	
			Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	70%	743.520.000			Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	70%	743.520.000	
			Persentase pemetaan kompetensi ASN	100%	1.021.000.000			Persentase pemetaan kompetensi ASN	100%	1.021.000.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100%	550.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100%	550.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100%	32.933.109.000			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	100%	32.933.109.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai saran masukan dalam peningkatan pelayanan organisasi. Proses usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan melalui kanal-kanal informasi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain website: <https://bkd.jatengprov.go.id>., whatsapp: 08112777346, twitter: @bkdjatengprov, email: bkd@jatengprov.go.id dan telpon (024) 8519421, 841581, 8318846. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait yang menangani substansi usulan/ laporan tersebut.

Usulan yang ditindaklanjuti adalah usulan yang memang menjadi ranah tupoksi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara program/kegiatan merupakan implementasi penyelesaian isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BKD sesuai tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Kinerja Individu untuk mendukung kinerja Organisasi	Semarang	Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang dapat mengukur kinerja individu untuk mendukung kinerja organisasi	1 aplikasi	Perlu dukungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan kinerja individu untuk mendukung kinerja organisasi
2	Penyusunan SKJ untuk seluruh level Jabatan	Semarang	Tersedianya Standar Kompetensi Jabatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1 dokumen	Perlu dukungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun SKJ untuk seluruh level Jabatan
3	Strategi Pengembangan Kompetensi ASN	Semarang	Terlaksananya strategi pengembangan kompetensi ASN	1 kegiatan	Perlu dukungan BPSDMD Prov. Jateng dalam Strategi Pengembangan Kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kinerja dan kompetensi
4	Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan system informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital	Semarang	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian berbasis digital yang cepat dan terintegrasi	49 OPD	Perlu dukungan Diskominfo Prov. Jateng untuk infrastruktur jaringan dan sekuritas

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2026 merupakan tahun pertama penjabaran pelaksanaan Renstra 2025-2029. Sebagaimana bentuk penjabaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Proses dan tahapan penyusunan Renja BKD tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta melaksanakan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renja BKD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025-2029. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, dan BKD Provinsi Jawa Tengah masuk pada prioritas daerah yang ke-satu yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis” dengan memfokuskan pengelolaan manajemen talenta dan pengembangan kompetensi yang didukung melalui transformasi digitalisasi pemerintahan yang cepat dan terintegrasi.

Renja BKD Tahun 2026 juga diselaraskan dengan RKPD Tahun 2026, RPJMN Tahun 2025-2029 dan mendukung pada pencapaian Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Birokrasi Nasional Tahun 2025-2029, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, , Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2019, dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

3.2.2 Sasaran Renja PD sesuai dengan Tugas, pokok dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Renja PD Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai
- b. Aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja
- c. Aspek perlindungan dan pelayanan
- d. Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin
- e. Aspek sistem informasi

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1.	Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi		Indeks Sistem Merit	Angka	0,87
		1. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Angka	93
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	86,5
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	3,1
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah	Angka	92

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel. 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Mewujudka n Manajemen ASN Berdasarka n Meritokrasi *										8.200.520.000		8.304.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
							Indeks Sistem Merit *	Angka	0,87		0,875		Badan Kepegawaia n Daerah	
	Meningka tnya Kualitas Manajeme n ASN **									8.200.520.000		8.304.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
							Indeks NSPK Manajemen ASN **	Angka	93	8.200.520.000	93,5	8.304.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWA IAN DAERAH ***							1.021.000.000		1.021.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terpetakan nya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN ***	%	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		5.03.0 2.1.03		Pengembang an Kompetensi ASN ****						1.021.000.000		1.021.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terlaksana nya penilaian kompetensi ASN	Persentase ASN yang dinilai kompetensiny a ****	%	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETEN SI	
		5.03.0 2.1.03. 0002			Pengelolaa n Assessmen t Center *****					2.042.000.000		2.042.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Terkelolan ya Assessmen t Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center *****	Dokumen	11250	1.021.000.000	11250	1.021.000.000	POKJA PENILAIAN KOMPETEN SI	JAWA TENGAH Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	%	N/A	0	N/A	0	POKJA PERENCAN AAN DAN EVALUASI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

		5.03.02. 1.03.00 02			Pengelolaan Assessment Center ****					0		0	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kompetensi ASN *****	Dokumen	N/A	0	N/A	0	POKJA PERENCAN AAN DAN EVALUASI	JAWA TENGAH< br>Unit Penilaian Kompeten si ASN Kelas A
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH ***							2.626.000.000		2.651.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengembang an Kompetensi	
						Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN ***	%	85	2.626.000.00 0	100	2.651.000.00 0	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengembang an Kompetensi	
		5.03.02. 1.03		Pengembangan Kompetensi ASN ****						2.626.000.00 0		2.651.000.00 0	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembanga n Kompetensi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terpenuhinya ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan lanjutan	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi ****	%	100	2.256.000.000	100	2.256.000.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		5.03.02.1.03.0004			Pengelolaan Pendidikan ASN *****					2.256.000.000		2.256.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
						Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola *****	Dokumen	150	2.256.000.000	150	2.256.000.000	Pokja Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	JAWA TENGAH
						Terlaksanan ya pengisian Jabatan Fungsional ASN sesuai kebutuhan	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN ****	%	100	370.000.000	100	395.000.000	Pokja Pengembangan an Jabatan Fungsional	
		5.03.02.1.03.0014			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional *****					320.000.000		320.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi	
						Terfasilita sinya Pengemba ngan Karir	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokume n	1500	320.000.000	1500	320.000.000	Pokja Pengembangan an Jabatan Fungsional	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						dalam Jabatan Fungsiona 1	Pengembanga n Karir dalam Jabatan Fungsional *****							
		5.03.0 2.1.03. 0015			Evaluasi Pengembang an Jabatan Fungsional *****					50.000.000		75.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengembang an Kompetensi	
						Terlaksanany a Evaluasi Pengembang an Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional *****	Laporan	2	50.000.000	2	75.000.000	Pokja Pengembang an Jabatan Fungsional	JAWA TENGAH
		5.03.0 2	PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH ***							1.090.000.000		1.215.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terpenuhi a Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta ***	%	92	1.090.000.000	94	1.215.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
		5.03.0 2.1.02		Mutasi dan Promosi ASN *****						1.090.000.000		1.215.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Promosi	
						Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi dan promosi	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi ****	%	92	775.000.000	94	900.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	
		5.03.0 2.1.02. 0001			Pengelolaan Mutasi ASN *****					375.000.000		400.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terlaksana nya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administra si, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah *****	Dokume n	2	375.000.000	2	400.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.03.0 2.1.02. 0003			Pengelolaan Promosi ASN *****					400.000.000		500.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terlaksana nya Pengelolaa n Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN *****	Dokume n	2	400.000.000	2	500.000.000	Pokja Mutasi dan Promosi ASN	Bidang Mutasi dan Promosi JAWA TENGAH
						Terfasilitasinya kenaikan pangkat ASN tepat waktu	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu *****	%	100	315.000.000	100	315.000.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaia n	
		5.03.02. 1.02.00 02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN *****					315.000.000		315.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi	
						Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN *****	Laporan	10000	315.000.000	10000	315.000.000	Pokja Kenaikan Pangkat ASN dan Layanan Adminstrasi Kepegawaia n	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH ***							1.120.000.000		1.102.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN ***	%	10	845.000.000	10	852.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
		5.03.02. 1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ****						845.000.000		852.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Meningkatnya kesejahteraan ASN	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ****	%	100	385.000.000	100	392.800.000	Pokja Kesejahteraa n ASN	
		5.03.02. 1.04.00 04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai *****					292.800.000		292.800.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Kinerja	
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan *****	Orang	200	292.800.000	200	292.800.000	Pokja Kesejahteraan ASN	JAWA TENGAH
		5.03.02. 1.04.00 05			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai *****					92.200.000		100.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa *****	Orang	1000	92.200.000	1000	100.000.000	Pokja Kesejahteraan ASN	JAWA TENGAH
						Meningkat nya pengelolaa n dan pembinaan disiplin ASN	Persentase pembinaan disiplin ASN *****	%	20	460.000.000	40	460.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	
		5.03.0 2.1.04. 0007			Pembinaan Disiplin ASN *****					180.000.000		180.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Penilaian Kinerja	
						Meningkat nya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan *****	Orang	15000	180.000.000	25000	180.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	JAWA TENGAH
		5.03.0 2.1.04. 0008			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN *****					280.000.000		280.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah - Bidang Pembinaa n dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksana nya Pengelolaan Penyelesaia n Pelanggara n Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN *****	Laporan	5	280.000.000	5	280.000.000	Pokja Pembinaan Disiplin Pegawai	JAWA TENGAH
						Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN ***	%	85	275.000.000	87,5	250.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah - Bidang Pembinaa n dan Penilaian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Kinerja	
		5.03.02.1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ****						275.000.000		250.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terfasilitasinya penilaian dan evaluasi kinerja ASN secara periodik	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya ****	%	100	275.000.000	100	250.000.000	Pokja Penilaian Kinerja	
		5.03.02.1.04.0002			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *****					275.000.000		250.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja	
						Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur *****	Dokumen	5	275.000.000	5	250.000.000	Pokja Penilaian Kinerja	Bidang Pembinaa n dan Penilaian Kinerja >JAWA TENGAH
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIA							2.343.520.000		2.315.000.000	Badan Kepegawaia	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			N DAERAH ***										n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi ***	%	100	1.600.000.000	100	1.455.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawa ian	
		5.03.02. 1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ****						1.600.000.000		1.455.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terselenggaran ya pengadaan ASN	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan CASN sesuai formasi ****	%	100	1.600.000.000	100	1.455.000.000	Pokja Pengadaa n dan Pemberhe ntian ASN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.03.02. 1.01.00 02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *****					60.000.000		75.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *****	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN *****	Dokumen 1		60.000.000	1	75.000.000	Pokja Pengadaa n dan Pemberhe ntian ASN	Badan Kepegawai an Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawai an
		5.03.02. 1.01.00 03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK *****					1.260.000.000		1.100.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK *****	Dokumen 1		1.260.000.000	1	1.100.000.000	Pokja Pengadaa n dan Pemberhe ntian ASN	Badan Kepegawai an Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														ntian dan Informasi Kepegawai an
		5.03.02. 1.01.00 06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian *****					280.000.000		280.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian *****	Dokumen	1979	280.000.000	1995	280.000.000	Pokja Pengadaa n dan Pemberhe ntian ASN	Badan Kepegawai an Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawai an
						Meningkatny a akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN ***	%	70	743.520.000	80	860.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		5.03.0 2.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN ****						743.520.000		860.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawa ian	
						Meningkatny a validitas data kepegawaian ASN	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi ****	%	70	385.000.000	80	385.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	
		5.03.0 2.1.01. 0010			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *****					385.000.000		385.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah - Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawa ian	
						Terkelolany a Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian *****	Dokumen	1	385.000.000	1	385.000.000	Pokja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Meningkatnya validitas dokumen kepegawaian ASN	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi *****	%	70	358.520.000	80	475.000.000	Pokja Pengelola an Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	
		5.03.02.1.01.0008			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN *****					175.000.000		225.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi Kepegawaia n	
						Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi *****	Lembaga	1	175.000.000	1	225.000.000	Pokja Pengelola an Data, Dokumen Kepegawaian dan Korps Profesi ASN	Bidang Pengadaa n, Pemberhe ntian dan Informasi Kepegawai an JAWA TENGAH
		5.03.02.1.01.0011			Pengelolaan Data Kepegawaian *****					183.520.000		250.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhenti an dan Informasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
													Kepegawaia n	
						Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian *****	Dokumen	1	183.520.000	1	250.000.000	Pokja Pengelolan an Data, Dokumen Kepegawa ian dan Korps Profesi ASN	JAWA TENGAH
Meningkatka n kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Badan Kepegawaian Daerah *										33.543.109.000		33.587.376.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
							Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah *	Angka	86,5		87		Badan Kepegawa ian Daerah	
	Meningkatn ya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Badan Kepegawaia n Daerah **									550.000.000		550.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah **	Angka	3,1	550.000.000	3,15	550.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							550.000.000		550.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah ***	%	100	550.000.000	100	550.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.01 .1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****						550.000.000		550.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	100	550.000.000	100	550.000.000	SUB BAGIAN PROGRA M	
		X.XX. 01.1. 01.00 01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****					250.000.000		250.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersusun nya Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****	Dokumen	18	250.000.000	18	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX. 01.1. 01.00 07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****					250.000.000		250.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Terlaksana nya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****	Laporan	23	250.000.000	23	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX. 01.1. 01.00 08			Pelaksanaan Pengumpula n Data Statistik Sektoral Daerah *****					25.000.000		25.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Terlaksana nya Pengumpu lan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah *****	Data	20	25.000.000	20	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Kepegaw aian Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX. 01.1. 01.00 10			Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****					25.000.000		25.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Terselengga ranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah *****	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	Badan Kepegaw aian Daerah
	Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah di Badan Kepegawaia n Daerah **									32.993.109.000		33.037.376.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah **	Angka	92	32.993.109.000	92,5	33.037.376.000	Badan Kepegawaia n Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							32.933.109.0 00		32.596.211.0 00	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Meningkatn ya kualitas pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaia n Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaia n Daerah ***	%	100	32.933.109.0 00	100	32.596.211.0 00	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****						27.695.143.000		27.848.245.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Meningkatn ya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokume n	14	27.695.143.000	14	27.848.245.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.0 1.1.02. 0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					26.801.955.000		26.951.955.000	Badan Kepegawa ian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	150	26.801.955.000	150	26.951.955.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					801.290.000		801.290.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	12	801.290.000	12	801.290.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					50.000.000		50.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	7	50.000.000	7	50.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.0 1.1.02. 0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****					20.000.000		20.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *****	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.0 1.1.02. 0007			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD *****					21.898.000		25.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Tersediany a Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	4	21.898.000	4	25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH< br>OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester an SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD *****							
		X.XX.01.1.02.0008			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****					0		0	Badan Kepegawaian Daerah	
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *****	Dokumen	N/A	0	N/A	0	SUB BAGIAN KEUANGAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *****						150.000.000		150.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.03.00 01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****					0		0	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	0	N/A	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.03.00 02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					150.000.000		150.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.03.00 06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					0		0	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	0	N/A	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.03.00 07			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****					0		0	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	0	N/A	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****						20.000.000		20.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	Sub Bagian Keuangan	
		X.XX.01 .1.04.00 07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****					20.000.000		20.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000	Sub Bagian Keuangan	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****						220.000.000		170.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ****	%	100	220.000.000	100	170.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	
		X.XX.01 .1.05.00 02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a *****					0		0	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	200	0	200	0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.05.00 09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****					190.000.000		140.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	30	190.000.000	30	140.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.05.00 10			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan *****					30.000.000		30.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan *****	Orang	140	30.000.000	140	30.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						1.285.966.00 0		1.305.966.00 0	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	100	1.285.966.00 0	100	1.305.966.00 0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	
		X.XX.01 .1.06.00 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor *****					20.000.000		20.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.06.00 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					140.000.000		140.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	2	140.000.000	2	140.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
		X.XX.01 .1.06.00 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					25.966.000		25.966.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	1	25.966.000	1	25.966.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01 .1.06.00 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					150.000.000		150.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tenga h Opd Provin si
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	1	150.000.000	1	150.000.000	Badan Kepegawai an Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.0 1.1.06. 0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n *****					100.000.000		100.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	Badan Kepegawai an Daerah	
		X.XX.0 1.1.06. 0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan *****					20.000.000		20.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	Badan Kepegawai an Daerah	
		X.XX.0 1.1.06. 0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					150.000.000		185.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	12	150.000.000	12	185.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					500.000.000		500.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Jawa Tengah Opd Provinsi
						Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	12	500.000.000	12	500.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					55.000.000		55.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Jawa Tengah Opd Provinsi
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	1	55.000.000	1	55.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					125.000.000		110.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Jawa Tengah Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokume n	12	125.000.000	12	110.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.0 1.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ****						780.000.000		280.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	
						Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ****	Unit	5	780.000.000	5	280.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.07. 0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan *****	Unit	1	0	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.07. 0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					500.000.000		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan *****	Unit	2	500.000.000	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.07. 0005			Pengadaan Mebel *****					30.000.000		30.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	3	30.000.000	3	30.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.07. 0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****							0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01.1.07.0007			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01.1.07.0008			Pengadaan Aset Tak Berwujud *****					150.000.000		150.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi
						Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan *****	Unit	1	150.000.000	1	150.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01.1.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah Opd Provinsi
						Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.07.00 10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					100.000.000		100.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah< Br>Opd Provinsi
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	6	100.000.000	6	100.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.01 .1.07.00 11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.01 .1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *****						2.062.000.000		2.112.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Laporan	12	2.062.000.000	12	2.112.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						perangkat daerah								
		X.XX.01 .1.08.00 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					12.000.000		12.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01 .1.08.00 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					700.000.000		700.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	12	700.000.000	12	700.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01 .1.08.00 03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					50.000.000		50.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah< Br>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersediany a Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.08. 0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					1.300.000.000		1.350.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawai an	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.01 .1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						720.000.000		710.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	
						Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan	Unit	27	720.000.000	27	710.000.000	Badan Kepegawa ian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						urusan pemerintahan daerah	pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *****							
		X.XX.01 1.1.09.00 01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****					0		0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JAWA TENGAH OPD Provinsi
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01 1.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					200.000.000		200.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Jawa Tengah Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	27	200.000.000	27	200.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.09. 0005			Pemeliharaan Mebel *****					30.000.000		20.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksanany a Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	1	30.000.000	1	20.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.0 1.1.09. 0006			Pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksan anya Pemelihar aan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	0	1	0	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Lainnya								
		X.XX.01 .1.09.00 07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	1	0	1	0	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.01 .1.09.00 08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawa ian	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawa ian Daerah	
		X.XX.0 1.1.09. 0009			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi *****	Unit	N/A	0	N/A	0	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX.0 1.1.09. 0010			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					300.000.000		300.000.000	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi
						Terlaksana nya Pemelihara an/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi *****	Unit	12	300.000.000	12	300.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah	
		X.XX. 01.1. 09.00 11			Pemelih araan/R ehabilita si Sarana dan Prasara na					0		0	Sub Bagian Umum Dan Kepegawaia n	Jawa Tengah<B r>Opd Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Penduk ung Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya *****									
						Terlaksanan ya Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi *****	Unit	-	0	-	0	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI ***							60.000.000		441.165.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
						Meningkatny a kualitas pelayanan umum, kepegawaian , dan keuangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	%	100	60.000.000	100	441.165.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN ***						A	
		X.XX.01 .1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah ****						60.000.000		140.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian , dan keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ****	%	N/A	60.000.000	N/A	140.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.06.00 01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					0		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	N/A	0	N/A	10.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Disediakan *****						A	
		X.XX.01 .1.06.00 02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					0		12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	0	N/A	12.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.06.00 03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					0		8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	0	N/A	8.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.06.00 04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					0		15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	0	N/A	15.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.06.00 05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****					0		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	0	N/A	10.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.06.00 06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan *****					0		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan *****	Doku men	N/A	0	N/A	5.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.06.00 08			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****					0		20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi
						Terlaksanan ya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Lapor an	N/A	0	N/A	20.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.06.00 09			Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					60.000.000		60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksanan ya Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Lapor an	12	60.000.000	12	60.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						0		155.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintaha n daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *****	Lapor an	N/A	0	N/A	155.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.08.00 01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					0		5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Lapor an	N/A	0	N/A	5.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.08.00 02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****					0		150.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Lapor an	N/A	0	N/A	150.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****						0		146.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya jasa pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemelintah n daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *****	Unit	N/A	0	N/A	146.165.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.09.00 02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					0		36.165.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompet e nsi ASN Kelas A
						Tersedianya Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	0	N/A	36.165.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.09.00 05			Pemeliharaan Mebel *****					0		10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Terlaksanan ya Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	0	N/A	10.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
		X.XX.01 .1.09.00 09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****					0		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Terlaksanan ya Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi *****	Unit	N/A	0	N/A	50.000.000	Badan Kepegawaia n Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungj awab	Lokasi
									2026		2027			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		X.XX.01 .1.09.00 10			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****					0		50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	Badan Kepegaw aian Daerah - Unit Penilaian Kompete nsi ASN Kelas A
						Terlaksanan ya Pemeliharaaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi *****	Unit	Unit	N/A	0	N/A		

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Manajemen risiko di level program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 merupakan program/kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan
BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi	Indeks Sistem Merit	Terdapat unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	12	Penetapan dalam pengisian jabatan merupakan kewenangan dari Gubernur selaku PPK	Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turun	Penguatan Regulasi berdasarkan sistem merit	Gubernur Jawa Tengah	TW I s.d TW IV
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Kebijakan pengelolaan kepegawaian yang dinamis	12	Kebijakan pengelolaan kepegawaian bergantung pada Instansi Pusat	terjadinya gejolak di masyarakat	Koordinasi dengan Instansi Pusat	Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah	TW I s.d TW IV
3	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemetaan kompetensi AS	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan	4	kepentingan pribadi	hasil dan proses penilaian tidak objektif	Digitalisasi metode penilaian	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV
4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	Hasil pengembangan kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan	6	Pengembangan kompetensi belum dijadikan prioritas	Pengembangan kompetensi belum berdampak pada peningkatan kinerja dan karir	Monitoring dan evaluasi secara periodik	Kepala Bidang Kompetensi	TW I s.d TW IV
5	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	Jual Beli Jabatan	12	Kepentingan pribadi	Jabatan diisi dengan orang yang tidak berkompeten	Penerapan sistem merit dalam proses promosi dan rotasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	TW I s.d TW IV
6	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	Intervensi dari pihak yang berkepentingan	9	Hubungan kekerabatan/kedekatan/afiliasi	Penjatuhan hukuman disiplin kurang objektif	Sosialisasi kepada ASN Pemprov Jawa Tengah	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan kinerja ASN	hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan dalam pengembangan karir	6	Belum menggambarkan kondisi real ASN	tools pengembangan karir tidak lengkap	Sosialisasi terkait penilaian kinerja	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV
8	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	Ketidaksesuaian Formasi dengan Kebutuhan	12	kurang koordinasi antar unit	Terdapat Guru yang tidak mendapatkan jam mengajar	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperbarui Anjab-ABK	Kepala Bidang PPIK	TW I s.d TW IV
9	Program Kepegawaian Daerah	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Terhambatnya layanan kepegawaian	6	Disparitas data dan dokumen kepegawaian	Pengambilan keputusan dilaksanakan secara tidak tepat	Sosialisasi dan desk pemutakhiran data mandiri	Kepala Bidang PPIK	TW I s.d TW IV
10	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kompetensi ASN	Soal CAT Potensi bocor	4	Bank soal kurang bervariasi	Hasil Tes CAT Potensi bias	-	-	-
11	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang dinilai kompetensinya	Permohonan fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi PNS fluktuatif	4	Permohonan Fasilitasi Penilaian Kompetensi dan Potensi bergantung pada kebijakan masing-masing PPK	Alokasi Sumber Daya yang disiapkan tidak optimal	Koordinasi dan komunikasi dengan pemohon	Kepala UPENKOM	TW I s.d TW IV
12	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Keterisian Jabatan Fungsional ASN	keterlambatan dalam pelantikan jabatan fungsional	6	persetujuan formasi jabatan dari Menpan RB	terhambatnya karir pejabat fungsional	sosialisasi secara masif	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	TW I s.d TW IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang menempuh pendidikan lanjutan hasil verifikasi	Keterlambatan dalam penyelesaian pendidikan lanjutan melalui tugas belajar	6	faktor kesehatan dan keluarga	kekosongan jabatan	Monev kolaborasi dengan OPD PNS bertugas, dan perguruan tinggi	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi	TW I s.d TW IV
14	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Keterisian Jabatan ASN melalui mekanisme mutasi & promosi	Terdapat pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	12	Keterbatasan kader suksesi yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan	Kinerja organisasi kurang maksimal	Pelaksanaan Talent Scouting dan Pemenuhan data base kuadran 9 untuk memperoleh kader suksesi	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	TW I s.d TW IV
15	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Pangkat ASN tepat Waktu	adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan dalam proses kenaikan pangkat ASN	8	Hubungan kekerabatan	Proses Kenaikan Pangkat tidak objektif	Penjadwalan batas akhir pengusulan KP dengan sistem	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	TW I s.d TW IV
16	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa	Hasil ujikes tidak sesuai dengan administrasi kepegawaian	6	Hasil Uji Kesehatan tidak sesuai kondisi Pasien	Kerugian Negara karena ASN masih menerima penggajian	Penyampaian profil ASN yang akan mengikuti Ujikes	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV
17	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	Keterlambatan dalam proses penilaian kinerja	6	Ketidakpedulian ASN terkait batas waktu penilaian kinerja	Pemotongan TPP ASN	Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja ASN	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV
18	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan disiplin ASN	Pembinaan disiplin tidak dilaksanakan	6	Atasan langsung kurang peduli	Meningkatnya kasus pelanggaran disiplin	-	Kepala Bidang PPK	TW I s.d TW IV
19	Pengadaan, Pemberhentian dan	Persentase pelaksanaan seleksi pengadaan	Kebijakan Penerimaan CASN	12	Kebijakan penerimaan CASN	Formasi tidak terpenuhi	Berkoordinasi dengan Instansi Pusat	Kepala Bidang	TW I s.d TW IV

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggun g Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Informasi Kepegawaian ASN	CASN sesuai formasi	tiap tahun bersifat tentatif		bergantung pada Instansi Pusat			Mutasi dan Promosi	
20	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Data kepegawaian yang tervalidasi	Penyajian data tidak akurat	6	peremajaan data tidak sesuai	terhambatnya layanan kepegawaian	1. Sosialisasi kelengkapan dan akurasi data kepegawaian dalam layanan kepegawaian 2. Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang PPIK	TW I s.d TW IV
21	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Dokumen kepegawaian yang tervalidasi	Penyajian dokumen tidak akurat	6	peremajaan dokumen tidak sesuai	terhambatnya layanan kepegawaian	1. Sosialisasi kelengkapan dan akurasi dokumen kepegawaian dalam layanan kepegawaian 2. Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang PPIK	TW I s.d TW IV

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Dukungan terhadap 136 Program Daerah Jawa Tengah (Jateng) diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti memastikan program daerah terintegrasi dalam rencana pembangunan, memprioritaskan program yang relevan, serta mengarahkan dukungan kota/kabupaten untuk mengimplementasikan program provinsi tersebut. Dukungan ini juga terlihat dari apresiasi terhadap program yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang terbukti dari prestasi di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah
Tahun 2026

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/Target/Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Formal ASN untuk melaksanakan tugas belajar dibiayai APBD dengan perhitungan pagu disesuaikan dengan inflasi biaya pendidikan	2025 : 18 Orang 2026 : 18 Orang 2027 : 18 Orang 2028 : 18 Orang 2029 : 18 Orang 2030 : 18 Orang	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Formal dengan persiapan beasiswa luar negeri melalui Tugas Belajar dan LPDP Preparation Program	6 Kegiatan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kesejahteraan ASN	2027 : 1 Pergub	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi	Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Penataan SDM Aparatur Pengawasan untuk Penguatan APIP	2025 : 12 Orang 2026 : 12 Orang 2027 : 19 Orang 2028 : 16 Orang 2029 : 13 Orang	1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1. Bidang Mutasi Promosi 2. Bidang Pengembangan Kompetensi	Biro Organisasi dan Inspektorat

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 merupakan penjabaran RKPD tahun 2026 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan pagu indikatif yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam bidang kepegawaian khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.” Serta fokus untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional.” Maka dari itu BKD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan prioritas daerah yang ke-satu yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis” dengan melaksanakan Tujuan Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.